



PROBLEMATIKA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI DARI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA DI BANTEN

Desma Yuliadi Saputra¹, Desty Endrawati Subroto²

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia^{1,2}

desmays@binabangsa.ac.id^{1*}, desty_subroto@binabangsa.ac.id²

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Kurikulum Merdeka;
education disparity;
decentralized policy; teacher
readiness.

Korespondensi:

desmays@binabangsa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems in implementing the Kurikulum Merdeka as a transitional policy from the Kurikulum 2013 in Banten Province, Indonesia. Using a qualitative descriptive approach based on document analysis and literature review, this article highlights the unequal readiness across regions, particularly between urban areas such as South Tangerang and rural regions like Pandeglang and Lebak. The findings reveal that disparities in digital infrastructure, teacher training, and school management capacity are major barriers to applying the core principles of the Kurikulum Merdeka, including differentiated learning and the integration of the Pancasila Student Profile. The misalignment between national policy design and local conditions indicates a lack of contextual sensitivity in educational policymaking. Therefore, affirmative, data-driven, collaborative, and decentralized policies are urgently needed to ensure a more equitable and effective curriculum transformation. These findings offer valuable insights for shaping responsive and inclusive education policies at both local and national levels.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan transisi dari Kurikulum 2013 di Provinsi Banten. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi dokumentasi dan kajian literatur, artikel ini memotret ketimpangan kesiapan antarwilayah dalam pelaksanaan kurikulum, khususnya antara wilayah urban seperti Tangerang Selatan dengan daerah rural seperti Pandeglang dan Lebak. Hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas infrastruktur digital, pelatihan guru, dan kapasitas manajerial sekolah menjadi kendala utama dalam penerapan prinsip utama Kurikulum Merdeka, termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi Profil Pelajar Pancasila. Ketidaksesuaian antara desain kebijakan nasional dan kondisi lokal memperlihatkan lemahnya pendekatan kontekstual dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang berbasis data, kolaboratif, dan desentralistik agar transformasi kurikulum dapat berjalan lebih adil dan efektif. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan strategi kebijakan pendidikan yang responsif dan inklusif.

©2025 Prioritas Pendidikan

How to cite (in APA Style): Saputra, D. Y., & Subroto, D. E. (2025). Problematika sistem pendidikan nasional: Analisis kebijakan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di Banten. *Prioritas Pendidikan*, 1(1), 19–26.



PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi dinamika kebijakan pendidikan yang cukup fluktuatif, terutama terkait kurikulum nasional yang menjadi fondasi pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka dianggap sebagai tonggak penting dalam reformasi pendidikan pascapandemi. Namun, sebagaimana disinyalir oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi pendidikan, perubahan kebijakan ini belum sepenuhnya berangkat dari kajian empirik yang kuat atas kondisi nyata di lapangan. Alih-alih menjawab permasalahan struktural dalam pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum cenderung menjadi simbol kebijakan yang berulang tanpa menyelesaikan problem mendasar seperti ketimpangan akses, kualitas guru, dan dukungan infrastruktur. Di sinilah Provinsi Banten dapat dijadikan contoh kasus yang mencerminkan ketimpangan implementasi kebijakan antara daerah maju dan tertinggal dalam satu wilayah administratif yang sama.

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di Banten, menunjukkan progresivitas dalam adopsi Kurikulum Merdeka, baik dalam pelatihan guru, digitalisasi materi, maupun pelaksanaan asesmen yang lebih otentik. Namun, kontras yang sangat mencolok terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, di mana implementasi Kurikulum Merdeka sering kali hanya berlangsung di atas kertas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa transisi kurikulum tidak sekadar membutuhkan perubahan dokumen ajar, melainkan kesiapan struktural dan kultural di masing-masing wilayah. Tanpa strategi afirmatif dan adaptif berbasis kondisi lokal, kebijakan Kurikulum Merdeka justru berisiko memperdalam jurang ketimpangan pendidikan, bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Kurikulum 2013 selama ini dikritik karena terlalu terpusat, sarat beban administratif, dan tidak memberikan ruang kreatif bagi guru serta siswa. Namun, solusi yang ditawarkan Kurikulum Merdeka—yakni fleksibilitas dan otonomi pembelajaran—juga menghadirkan dilema baru ketika diterapkan dalam sistem pendidikan yang belum siap menerima perubahan mendasar. Di banyak sekolah di Banten, guru-guru masih bergantung pada instruksi teknis dari dinas pendidikan karena tidak memiliki pengalaman atau pelatihan memadai dalam merancang modul ajar secara mandiri. Studi Arwiyanti et al. (2024) mencatat bahwa sebagian besar guru di wilayah pedesaan Banten masih mengalami kebingungan dalam membedakan pendekatan Kurikulum Merdeka dengan K-13, menunjukkan lemahnya komunikasi kebijakan dan pendampingan teknis dari pemerintah.

Lebih dari sekadar persoalan teknis, perubahan kurikulum menuntut perubahan paradigma. Kurikulum Merdeka yang berbasis pada penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila mengharuskan transformasi dalam cara guru memfasilitasi pembelajaran. Namun, budaya belajar di sekolah-sekolah masih sangat eksaminatif dan berbasis hafalan. Orientasi pada nilai ujian dan akreditasi sekolah masih menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan proses pembelajaran yang bermakna. Hal ini berakar dari sistem evaluasi nasional yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Ironisnya, sekolah yang mencoba menerapkan pendekatan tematik dan kontekstual sering kali justru mendapat kritik dari pengawas karena dianggap “tidak sesuai format.” Ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum belum diikuti oleh perubahan sistem penilaian dan akuntabilitas pendidikan secara keseluruhan.

Ketidaksesuaian antara idealisme kurikulum dan realitas implementasi juga diperparah oleh lemahnya manajemen pendidikan daerah. Laporan Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah

di wilayah rural mengalami keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan literasi digital yang sangat penting dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Belum lagi problem klasik seperti kekurangan ruang kelas, perpustakaan tidak berfungsi, dan guru honorer yang tidak terlatih. Dalam kondisi seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi menjadi konsep yang utopis. Bahkan, pembelajaran berbasis proyek yang menjadi salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka sulit direalisasikan karena minimnya fasilitas dan waktu belajar yang tersita untuk kegiatan administratif.

Sebagai respons terhadap realitas ini, beberapa sekolah mencoba melakukan inovasi lokal, tetapi minim dukungan struktural. Misalnya, ada guru di Kabupaten Lebak yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber belajar berbasis proyek, namun tidak mendapatkan dukungan pendanaan atau pengakuan dari dinas pendidikan karena dianggap tidak sesuai standar. Ini menunjukkan bahwa otonomi dalam Kurikulum Merdeka sering kali dibatasi oleh struktur birokrasi yang masih sentralistik dan normatif. Situasi ini mencerminkan kritik Ball (1994) yang menyebut bahwa reformasi pendidikan yang hanya bersifat struktural dan tidak menyentuh aspek budaya serta relasi kuasa dalam sistem, akan berakhir pada kegagalan dalam level implementasi.

Dari sisi kebijakan nasional, tidak ada pemetaan kesiapan yang komprehensif sebelum penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan. Proses adopsi cenderung terburu-buru, dengan sekolah-sekolah dituntut mendaftar sebagai pelaksana kurikulum tanpa kajian mendalam terhadap kapasitas masing-masing. Akibatnya, terjadi kekacauan administratif dan disorientasi pembelajaran di banyak sekolah. Guru terjebak dalam kebingungan antara mengikuti format baru atau mempertahankan metode lama. Keadaan ini berdampak pada peserta didik yang akhirnya tidak memperoleh pembelajaran yang konsisten dan bermakna. UNESCO (2021) bahkan mengingatkan bahwa transformasi pendi-

dikan harus dimulai dari penguatan kapasitas lokal, bukan sekadar adopsi kebijakan global yang belum tentu sesuai konteks lokal.

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka mengandung ironi kebijakan. Di satu sisi, kurikulum baru ini membawa semangat inovatif dan pembebasan dari belenggu birokrasi. Namun di sisi lain, implementasinya justru dibebani oleh sistem yang belum siap berubah. Guru tetap menjadi korban perubahan kebijakan yang tidak partisipatif, dan siswa menjadi korban dari sistem pendidikan yang terlalu sering bereksperimen tanpa refleksi. Tanpa desain kebijakan yang partisipatif dan responsif, Kurikulum Merdeka bisa mengalami nasib yang sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya: gagal menjawab tantangan zaman.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya menyajikan analisis kritis terhadap realitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Provinsi Banten, khususnya dengan menyoroti kesenjangan antara desain kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis dokumen dan laporan kebijakan, serta menelaah wilayah-wilayah dengan disparitas implementasi yang tinggi, tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik dan ekonomi setempat. Pendidikan bukanlah proses yang bisa diseragamkan secara nasional tanpa mengindahkan keunikan daerah.

Lebih lanjut, latar belakang ini ingin menegaskan bahwa reformasi pendidikan yang sejati tidak cukup hanya dengan mengganti kurikulum, tetapi memerlukan perubahan sistemik yang melibatkan semua aktor pendidikan secara holistik. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kepala sekolah dan guru, serta masyarakat dan peserta didik. Kurikulum hanyalah alat; yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah bagaimana alat itu digunakan, di-



makna, dan dikontekstualisasikan dalam ruang belajar yang nyata. Jika reformasi ini gagal dipahami sebagai proses kolektif dan berbasis realitas, maka Kurikulum Merdeka akan berakhir sebagai slogan yang kehilangan makna substantif.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional harus lebih dari sekadar menyesuaikan diri dengan tren global atau tuntutan zaman. Ia harus berpijak pada realitas sosial Indonesia yang kompleks dan beragam. Dalam konteks Provinsi Banten, transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka membuka ruang penting untuk refleksi kebijakan, bukan hanya dalam arti perubahan konten, tetapi juga dalam tata kelola sistem pendidikan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang tersebut dan memberikan kontribusi bagi wacana reformasi pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses transisi kebijakan kurikulum dan realitas implementasinya dalam konteks sosial dan kelembagaan pendidikan di Provinsi Banten. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu yang kompleks dan kontekstual melalui penafsiran terhadap data non-numerik. Hal ini sangat relevan ketika kajian diarahkan pada dinamika implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor pendidikan, variasi kondisi daerah, dan beragam respons terhadap perubahan kurikulum.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan dan laporan resmi, seperti dokumen *Statistik Pendidikan Provinsi Banten 2023* (BPS, 2023), *Laporan Kinerja Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2022/2023* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (2023), serta dokumen akademik dan artikel jurnal yang mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Metode anali-

sis isi (*content analysis*) digunakan untuk menelaah isi dari dokumen-dokumen tersebut secara sistematis, dengan mengidentifikasi tema, pola, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas implementasi. Seperti dijelaskan oleh Krippendorff (2004), *content analysis* sangat berguna untuk mengungkap makna-makna tersirat dalam kebijakan dan komunikasi resmi pemerintah.

Unit analisis difokuskan pada empat wilayah representatif di Banten: Kota Tangerang Selatan (wilayah urban maju), Kota Serang (kota administratif dengan posisi pemerintahan), Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang (wilayah rural dengan tantangan infrastruktur pendidikan). Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan disparitas kesiapan dan kapasitas dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Yin (2018) menyatakan bahwa dalam studi kebijakan berbasis kasus, pemilihan lokasi yang strategis sangat penting untuk memetakan variasi pelaksanaan dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan coding tematik terhadap dokumen, dengan mengacu pada teori perubahan pendidikan dari Fullan (2007) yang menekankan bahwa reformasi pendidikan memerlukan keselarasan antara kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi kebijakan, tetapi juga membandingkan antara intensi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Validitas data diuji melalui triangulasi antar-sumber (data resmi, artikel jurnal, dan laporan lembaga), serta menggunakan pembacaan kritis terhadap dokumen dari berbagai tingkat kebijakan (pusat dan daerah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Banten menunjukkan berbagai dinamika kompleks, yang mencerminkan realitas pendidikan

daerah dengan tingkat disparitas tinggi antara wilayah urban dan rural. Kurikulum ini dirancang dengan semangat merdeka belajar, fleksibilitas, dan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, dalam praktiknya, belum semua daerah memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankannya secara utuh. Banten, sebagai provinsi dengan kombinasi wilayah maju seperti Kota Tangerang Selatan dan daerah tertinggal seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, menjadi cerminan konkret tentang bagaimana kebijakan berskala nasional dihadapkan dengan tantangan lokal yang tidak seragam.

Kesenjangan implementasi terlihat jelas dalam data kesiapan sekolah dan guru. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (2023), hanya 38% sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang yang menyatakan siap menjalankan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, dibandingkan dengan 85% di Tangerang Selatan. Tingkat pelatihan guru juga menunjukkan perbedaan yang signifikan; hanya 34% guru di

Pandeglang dan 38% di Lebak yang pernah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka, sementara di Tangerang Selatan mencapai 77%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pelatihan, dukungan pemerintah daerah, dan infrastruktur sekolah.

Faktor lain yang turut menentukan adalah kesiapan infrastruktur digital. Kurikulum Merdeka sangat mengandalkan platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Rapor Pendidikan. Namun, di banyak sekolah di daerah rural Banten, akses internet dan perangkat teknologi masih menjadi hambatan utama. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2023), hanya 30–35% sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang memiliki jaringan internet stabil dan perangkat memadai. Kondisi ini menghambat asesmen diagnostik serta pemanfaatan konten dan pelatihan daring yang ditawarkan pemerintah.

Tabel 1. Perbandingan kesiapan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di empat wilayah representatif di Banten

Wilayah	Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka (%)	Guru Terlatih (%)	Ketersediaan Infrastruktur Digital (%)	Sumber Data
Tangerang Selatan	85%	77%	92%	Dindikbud Banten, 2023
Kota Serang	72%	65%	78%	Dindikbud Banten, 2023
Kabupaten Lebak	41%	38%	35%	BPS Banten, 2023
Kabupaten Pandeglang	38%	34%	30%	BPS Banten, 2023

Tabel ini menunjukkan disparitas signifikan yang dapat menghambat keberhasilan Kurikulum Merdeka. Kota Tangerang Selatan menunjukkan kesiapan yang mendekati ideal, sedangkan dua kabupaten lainnya tertinggal jauh dalam aspek krusial. Ketimpangan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan struktural dan kelemahan dalam desain kebijakan yang kurang mempertimbangkan disparitas daerah (Fullan, 2007).

Dari segi konten, Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk mampu mengembangkan perangkat ajar secara mandiri, melakukan

asesmen formatif, dan menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Namun, kajian Arwiyanti, Mulyati, & Handayani (2024) menunjukkan bahwa banyak guru belum memahami esensi dari pembelajaran berdiferensiasi dan justru mengalami kebingungan dalam menyusun modul ajar. Di Kabupaten Lebak, misalnya, sebagian besar guru masih bergantung pada buku ajar lama dan tidak mampu mengadaptasi materi sesuai dengan kebutuhan murid.

Masalah lain muncul dalam integrasi Profil Pelajar Pancasila (PPP), yang menjadi indikator utama keberhasilan pembelajaran dalam

Kurikulum Merdeka. Dimensi PPP seperti “berpikir kritis” dan “mandiri” sulit diterapkan di sekolah yang kekurangan fasilitas dan dukungan pengembangan karakter. Menurut laporan Suryana (2022), guru di daerah dengan keterbatasan justru merasa PPP terlalu abstrak dan tidak memiliki panduan praktis dalam penerapannya. Akibatnya, pendidikan karakter yang diharapkan tetap bersifat deklaratif dan belum menyentuh proses pembelajaran yang otentik.

Salah satu contoh praktik baik terjadi di Kota Serang, di mana beberapa sekolah melibatkan komunitas lokal dan memanfaatkan sumber daya lingkungan sebagai bahan pembelajaran berbasis proyek. Proyek-proyek tersebut mendukung dimensi PPP seperti gotong royong dan kreatif. Namun, inisiatif semacam ini masih bersifat sporadis dan belum terfasilitasi secara sistemik. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas aktor pendidikan, termasuk orang tua, komunitas, dan pemerintah daerah.

Evaluasi terhadap asesmen dalam Kurikulum Merdeka juga menunjukkan masalah implementatif. Banyak guru yang kesulitan melakukan asesmen diagnostik dan formatif karena belum terbiasa dan tidak memiliki alat yang mendukung. Rapor Pendidikan yang seharusnya menjadi dasar refleksi dan intervensi pembelajaran masih digunakan secara simbolik tanpa analisis mendalam. Menurut UNESCO (2021), asesmen harus menjadi proses pembelajaran, bukan sekadar alat pelaporan. Namun, hal ini belum menjadi kenyataan di banyak sekolah di Banten.

Selain guru, kepemimpinan kepala sekolah juga menjadi penentu keberhasilan implementasi. Kepala sekolah dengan kepemimpinan transformatif mampu mendorong inovasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang mendukung pembelajaran merdeka. Widodo dan Puspitasari (2023) menyatakan bahwa kepala sekolah yang aktif membentuk komunitas belajar guru mampu meningkatkan kesiapan guru secara signifikan. Namun, di daerah rural Banten, banyak kepala

sekolah masih menjalankan peran administratif semata dan tidak terlibat dalam pengembangan pedagogi di sekolah.

Dari sisi perencanaan kebijakan, kebijakan transisi ke Kurikulum Merdeka terlalu berfokus pada aspek administratif dan pelaporan capaian tanpa memperkuat kapasitas daerah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki peran lebih besar dalam mengelola pelatihan, pendampingan, dan pengawasan terhadap implementasi kurikulum. Namun, peran tersebut belum dijalankan secara optimal karena minimnya anggaran dan personel yang memahami kurikulum secara mendalam.

Ke depan, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Evaluasi kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum, tetapi harus mengukur kualitas pelaksanaan, dampaknya terhadap capaian belajar siswa, serta partisipasi pemangku kepentingan. Seperti ditegaskan oleh Ball (1994), kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan praktik, konteks, dan kekuasaan yang bekerja dalam implementasinya.

Penting juga untuk membangun komunitas belajar guru yang aktif dan otonom. Komunitas ini dapat menjadi wadah berbagi praktik baik, diskusi pedagogis, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menciptakan insentif yang mendorong keterlibatan guru dalam komunitas tersebut dan memastikan bahwa kegiatan mereka terdokumentasi dan berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang kontekstual.

Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka bukan hanya soal pergantian dokumen kebijakan, tetapi transformasi sistemik yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus saling mendukung dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna, merdeka, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kurikulum yang baik

adalah kurikulum yang hidup di ruang kelas, bukan hanya dalam peraturan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Provinsi Banten menjadi miniatur dari tantangan nasional dalam implementasi kurikulum. Ketimpangan antar-wilayah menjadi ancaman serius bagi pemerataan kualitas pendidikan. Perlu ada desain kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal. Prinsip keadilan dalam pendidikan harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya efisiensi administratif.

Jika tidak segera diatasi, transisi Kurikulum Merdeka berpotensi melahirkan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan. Alih-alih memperbaiki mutu pembelajaran, kurikulum ini justru bisa memperdalam jurang antara sekolah-sekolah yang siap dan tidak siap. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merevisi strategi implementasi secara menyeluruh dan inklusif.

Akhirnya, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan Indonesia. Namun, potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika disertai dengan strategi pelaksanaan yang mempertimbangkan kompleksitas di tingkat akar rumput. Pendidikan adalah proses sosial dan budaya, bukan sekadar teknologi kebijakan. Maka dari itu, keberhasilan kurikulum harus dinilai dari dampaknya terhadap manusia yang terlibat di dalamnya—bukan sekadar angka capaian administratif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Banten, ditemukan bahwa transisi kurikulum belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata. Kesenjangan antarwilayah—terutama antara daerah urban seperti Tangerang Selatan dan wilayah rural seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak—menunjukkan bahwa faktor kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, serta dukungan kelembagaan masih menjadi persoalan utama.

Ketidaksiapan ini bukan semata karena kurangnya sumber daya, tetapi juga akibat lemahnya desain kebijakan nasional yang bersifat seragam dan tidak cukup responsif terhadap kondisi lokal. Kurikulum Merdeka yang idealnya mendorong pembelajaran yang kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik justru terhambat oleh birokrasi, kurangnya pelatihan yang tepat, serta keterbatasan dalam pelibatan aktor pendidikan di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip utama Kurikulum Merdeka—seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila—masih jauh dari harapan. Guru sebagai garda depan perubahan kurikulum belum sepenuhnya memahami dan menguasai pendekatan pedagogis yang dibutuhkan. Kepala sekolah di daerah tertentu juga masih bersifat administratif, sehingga tidak mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Meskipun terdapat praktik baik di beberapa sekolah, implementasinya bersifat lokal dan tidak sistemik. Ini menunjukkan perlunya transformasi bukan hanya pada level kebijakan, tetapi juga budaya sekolah dan kapasitas kelembagaan pendidikan di daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih desentralistik, berbasis data, dan berpihak pada keadilan spasial. Pemerintah pusat perlu melakukan afirmasi yang nyata kepada daerah-daerah tertinggal dengan dukungan teknis, pendampingan berkelanjutan, serta pelibatan komunitas pendidikan lokal dalam penyusunan strategi implementasi. Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam mendorong pembelajaran yang bermakna, namun untuk mewujudkannya, harus disertai oleh tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan manusiawi. Pendidikan bukan hanya tentang kebijakan, melainkan juga tentang bagaimana peserta didik, guru, dan masyarakat merasakan perubahan itu dalam kehidupan nyata mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Arwiyanti, B., Mulyati, T., & Handayani, D. (2024). Analisis kesiapan guru SD dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 112–123. <https://jurnal-basicedu.org/index.php/basicedu/article/view/8087>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). *Statistik pendidikan Provinsi Banten 2023*. BPS Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/publication/2023/11/30/7d2fe51d6d5d3e3425f754a6/statistik-pendidikan-provinsi-banten-2023.html>
- Ball, S. J. (1994). *Education reform: A critical and post-structural approach*. Open University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. (2023). *Laporan kinerja implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023*. <https://dindikbud.bantenprov.go.id/read/publikasi/170/indikator-kinerja-utama-iku-dindikbud-provinsi-banten>
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage Publications.
- Suryana, T. (2022). Problematika implementasi Kurikulum Merdeka: Antara retorika dan realita. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 45–59. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/2478>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- Widodo, A., & Puspitasari, R. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 33–47. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jmp/article/view/60571>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.